

2. Kegiatan studi lanjut terkait dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan perlu dilanjutkan dan diperluas melalui peningkatan subsidi dari pemerintah daerah atau instansi terkait.
3. Pengembangan sarana prasarana terkait dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan khususnya alat peraga/media buku dan fasilitas pembelajaran yang menunjang pelaksanaan KBK

Daftar Pustaka

- Anonimous.1999. *Ketetapan-ketetapan MPR Republik Indonesia 1999 beserta GBHN Republik Indonesia 1999 – 2004 (Edisi lengkap)*. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Depdiknas. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2005. *Program dan kegiatan melalui dekonsentrasi SMP tahun anggaran 2005*. Yogyakarta: Proyek Peningkatan Mutu SLTP DIY 2004
- Olim, A. 1999. Kemampuan membelajarkan diri pemuda pelopor dan pengembangannya (Studi kualitatif proses membelajarkan diri pemuda pelopor Jawa Barat dalam meningkatkan efektivitas dan produktivitas pembelajaran serta mengantisipasi era Globalisasi). Disertasi Doktor pada PPs. IKIP Bandung: Tidak diterbitkan.
- Pak Guru Online (tt). *Pedoman tim teknis program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP Kabupaten/Kota*. Diambil dari; <http://www.geocities.com/pakguruonline/ttk> pada tanggal 3 Mei 2005.
- Riley, Kathryn A., & Nuttall, Dersmond, L,. 1994. *Measuring quality education indicators*. London: The Falmer Press.
- Squires, David, A., Huitt, William, G., and Segars, John, K,. 1983. *Effective schools and classrooms: a research-based perspective*. North Washington Street Alexandria, Virginia: ASCD.
- Tilaar, HAR. 1998. *Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif abad 21*. Magelang: Penerbit Tera Indonesia.
- Zamroni.2000. *Paradigma pendidikan masa depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

POLA MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS SEKOLAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA SEKOLAH

Studi Kasus di SMP Negeri 1, 5, dan 8 Yogyakarta

Oleh:
Mubamad Jaeni

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan perencanaan, prosedur pengesahan, pelaksanaan, mekanisme dan bentuk laporan, serta evaluasi anggaran berbasis sekolah, pengaruh pola manajemen keuangan terhadap kinerja sekolah, dan upaya sekolah menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen sekolah. Informan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, guru, staf administrasi, anggota OSIS, komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD), dan Lembaga Pengawasan Internal (LPI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, RAPBS selalu mengalami kenaikan sekitar 20% tiap tahun. Dalam konteks MBS, pendekatan perencanaan keuangan yang dipakai tidak lagi menggunakan *line item budget*, tetapi didasarkan kepada kebutuhan program dan kinerja sekolah. Dalam rapat RAPBS, seringkali kepala sekolah dan bendahara hanya membahas dana dari pemerintah dan orang tua. Kedua, laporan, pengesahan, dan evaluasi keuangan sekolah disampaikan dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Tim Monitoring *Block Grant*, yang terdiri dari dinas P&P, Dewan Pendidikan, Bappeda, BPKD, dan LPI. Ketiga, Sekitar 85% anggaran sekolah dipergunakan untuk gaji dan kesejahteraan, sementara sisanya untuk KBM menggunakan dana *block grant* dari pemerintah. Kinerja evaluator belum maksimal. Keempat, upaya kepala sekolah serta *stakeholders* untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Kata Kunci: *manajemen keuangan berbasis sekolah, kinerja sekolah.*

Pendahuluan

Otonomi daerah yang mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 akan menentukan system kinerja pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, telah dikembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dimana manajemen sekolah akan berubah (Fasli Jalal dan Supriadi, 2001: 156).

Pada prinsipnya, MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai kebijakan internal sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara mandiri. Dengan demikian, sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang sangat lebar dalam menentukan kebijakan-kebijakan sekolah termasuk kebijakan dalam pengelolaan dana sekolah untuk mewujudkan mutu program dan kinerja sekolah yang baik, yaitu mencapai efisiensi dan efektivitas pendidikan. Sekolah dituntut untuk mempunyai strategi menggali sekaligus mengelola sumber daya dan sumber dana yang terdapat dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat..

Dengan alasan di atas sudah saatnya pemerintah membuat aturan pola manajemen keuangan yang berbasis sekolah. Selanjutnya pola manajemen keuangan baru tersebut dibuat secara baku, terperinci, sistematis dan *aplicable*.

Pada dasarnya, hal terpenting dalam manajemen keuangan adalah proses siklus anggarannya. Dengan siklus anggaran yang baik diharapkan pengelolaan dana bisa dilakukan secara lebih cermat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Siklus anggaran sekolah biasanya meliputi; perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan pelaporan serta evaluasi anggaran.

Selama ini perencanaan keuangan sekolah masih menggunakan pendekatan tradisional, yaitu *line item budget*, menentukan besar budget yang didasarkan pada besarnya budget tahun lalu dengan peningkatan dan penurunannya sesuai dengan kecenderungan yang terjadi. Kelemahan dari perencanaan seperti ini adalah tidak adanya akuntabilitas atau proses menjelaskan pemanfaatan dana dalam rangka kontribusinya kepada peningkatan mutu dan kinerja sekolah yang baik. Dengan demikian, sistem perencanaan di atas tidaklah sesuai dengan konsep MBS yang menekankan pada peningkatan mutu dan kualitas kinerja sekolah yang baik.

Sementara itu, proses pengesahan anggaran sekolah selama ini boleh dibilang cukup rumit. Proses pengesahan dilakukan setelah RAPBS dibuat, kemudian diajukan kepada Kakanwil Depdikbud Provinsi, Depdikbud Kabupaten/kota (sekarang Kepala Diknas Provinsi dan kabupaten/kota) untuk mendapatkan persetujuannya/saran serta mendapatkan perbaikannya, sekalipun pada akhirnya besarnya alokasi dana yang diberikan itu sudah diputuskan pemerintah dan tidak dapat diubah lagi.

Dari titik pandang ini, peran pemerintah masih sangat besar dalam menentukan keputusan termasuk dalam menentukan besarnya anggaran sekolah. Dengan sistem kebijakan pusat seperti ini, sekolah selalu menerima dana yang diberikan atau yang sudah ditetapkan pemerintah. Kondisi seperti ini akan sangat mempengaruhi kinerja, program, serta keleluasaan sekolah dalam membuat kebijakan-kebijakan lainnya. Tidak menutup kemungkinan ketika pemerintah tidak memenuhi anggaran yang diusulkan sekolah, maka kinerja, program, serta kebijakan-kebijakan sekolah lainnya secara otomatis akan berubah atau sebaliknya akan "tombok". Selain itu aturan serta standar pengesahan proposal serta kriteria pengalokasian anggaran selama ini belum dibuat, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam pengesahan dan penentuan anggaran dari setiap sekolah tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan rasional.

Di dalam pelaksanaan anggaran, seringkali sekolah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, yang paling penting pada tahap implementasi adalah kebutuhan akan sistem dan prosedur implementasi yang memadai. Dalam hal ini kepala sekolah harus betul-betul komit dengan peraturan yang telah dibuat serta selalu memantau pelaksanaannya. Ini semua dimaksudkan untuk mencegah adanya penyimpangan (*variance*) terhadap keuangan sekolah.

Sekolah harus mempersiapkan pembukuan, melakukan pem-belanjaran dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah masalah penentuan kinerja serta program. Sering kali

kepala sekolah serta staf keuangan yang berkaitan merencanakan/menyusun program selalu terpaku kepada dana yang tersedia. Mereka tidak terkonsentrasi dalam menyusun strategi dan menentukan besarnya dana yang didasarkan pada rencana dan kebutuhan program. Ini sangat disadari, karena sistem pengalokasian dana itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang mau tidak mau harus diterima oleh sekolah.

Kaitannya dengan pelaporan dan evaluasi anggaran, selama ini hanya dilakukan kepada/oleh pemerintah pusat/daerah. Prosedur laporan keuangannya pun belum jelas, begitu juga pada tindakan evaluasi yang belum jelas dan jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukan.

Hal lain yang penting yang harus kita lihat adalah pengaruh pola manajemen keuangan yang berbasis sekolah terhadap program dan kinerja sekolah yang baik, yakni sekolah efektif.

Dari pemaparan tersebut di atas, maka dapat diformulasikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pola manajemen keuangan sekolah yaitu; (1) Bagaimana sistem perencanaan keuangan berbasis sekolah di SMPN 1,5, dan 8 Yogyakarta?, (2) Bagaimana mekanisme pengesahan anggaran berbasis sekolah kepada pihak-pihak terkait di SMPN 1, 5, dan 8 Yogyakarta?, (3) bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah dan masyarakat di SMPN 1, 5, dan 8 Yogyakarta?, (4) bagaimana sistem serta mekanisme laporan serta evaluasi keuangan di SMPN 1, 5, dan 8 Yogyakarta?, (5) Apakah pola manajemen keuangan berbasis sekolah itu berpengaruh kepada kinerja sekolah SMPN 1, 5, dan 8 Yogyakarta?

Untuk membahas permasalahan di atas berikut dikemukakan beberapa konsep terkait yaitu: anggaran, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah (MKBS) dan kinerja sekolah efektif

Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu (Nanang Fatah, 2000: 47). Mardiasmo membagi tujuh fungsi utama anggaran sebagai; (a) alat perencanaan, (b) alat pengendalian, (c) alat kebijakan fiskal, (d) alat politik, (e) alat koordinasi dan komunikasi, (f) alat penilaian kinerja, (g) alat

motivasi. (Mardiasmo, 2002:96). Sementara itu, siklus anggaran di sekolah pada dasarnya sama seperti siklus anggaran di sektor publik lainnya yang meliputi empat tahap yaitu; perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi (Mardiasmo, 2002:108).

Secara umum Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendo-rong keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orangtua siswa, dan masyarakat) untuk mening-katkan sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. (Depdiknas, 2001: 16).

Secara sederhana Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah yang penulis singkat MKBS adalah proses kegiatan merencanakan, melaksana-kan dan mengevaluasi serta mempertang-gungjawabkan pengelolaan keuangan di sekolah yang sudah menerapkan pola Manajemen Berbasis Sekolah.

MKBS dituntut untuk mengelola dana secara efektif dan efisien serta memper-tanggung-jawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam MKBS pemisahan tugas dari unit atau satuan fungsi keuangan harus dipertegas. Pemisahan ini harus berasaskan pada fungsi otorisator, fungsi ordonator, dan bendaharawan.

Fred (2000:336) mengemukakan beberapa prinsip penting dari sekolah efektif. Prinsip-prinsip tersebut adalah; harapan tinggi terhadap prestasi siswa, kurikulum dibuat secara baik, proses pembelajaran yang baik, standard penilaian yang jelas, memaksimalkan jam belajar, pengem-bangan tenaga pengajar, tanggung jawab pada sekolah, insentif/reward bagi siswa dan guru berprestasi, keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan iklim sekolah yang baik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang pakai adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang terkumpul dari hasil, wawancara, observasi, dan dokumentasi diuraikan dan dirinci secara jelas serta diinterpretasikan sehingga menghasilkan kesimpulan. Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bersifat kasuistis, yang modus laporannya bersifat deskriptif atas realitas yang tampil

dari interaksi peneliti dengan responden atau objek penelitian. Rencananya penelitian ini akan dilakukan melalui empat tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengambilan data, tahap analisa data, dan terakhir tahap penulisan laporan (Moleong, 2002: 109).

Secara lengkap subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, kepala tata usaha, guru pengurus, pengurus dan anggota komite sekolah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pemilihan responden ini dilakukan secara purposif atau sesuai dengan tujuan fokus penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu pengamatan dengan partisipasi (*participant observation*), wawancara secara mendalam (*indepth interview*), dan analisis dokumen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pola Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah

Sekalipun pola MBS sudah diterapkan di SMPN 1, 5, dan 8 Yogyakarta, tetapi untuk rumusan atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai dengan konsep MBS tersebut belum seluruhnya dapat dilaksanakan. Ketiga sekolah di atas cenderung masih menggunakan pola manajemen keuangan sebelumnya. Hal ini terjadi karena di samping pedoman pengelolaan keuangan sekolah yang baku belum dirumuskan, sekolah-sekolah tersebut masih memakai sistem yang lama sekalipun di tengah perjalanannya mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan yang terus berubah.

Hal seperti ini juga merupakan salah satu bentuk upaya sekolah untuk terus berusaha membenahi sekaligus mempersiapkan sistem pengelolaan keuangan sekolah yang baru, yang sesuai dengan prinsip-prinsip MPMBS. Implikasi dari otonomi sekolah dan MPMBS menyebabkan adanya perubahan dalam pola manajemen keuangan di sekolah. Perubahan tersebut terutama pada siklus anggaran yang meliputi perencanaan anggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan anggaran, laporan pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran.

Hubungan MKBS dan Kinerja Sekolah

Pola manajemen Keuangan yang baik dan berbasis sekolah sedikit banyak akan berpengaruh pada peningkatan kinerja sekolah. Kinerja sekolah yang dimaksud adalah kinerja sekolah yang efektif. Ada beberapa pengaruh dari pola manajemen keuangan yang baik terhadap kinerja di SMPN 1, 5, dan 8 Yogyakarta, di antaranya;

1. Dukungan yang kuat dari orang tua dan masyarakat kepada sekolah. Setelah diterapkannya MPMBS, sekolah mulai menyusun strategi untuk mendapatkan dana yang akan mendukung kepada peningkatan mutu dan kinerja. Strategi yang dilakukan sekolah adalah meyakinkan kepada orang tua dan masyarakat akan pentingnya dukungan mereka. Sekolah berupaya memperkuat mereka dengan bahwa untuk meningkatkan mutu sekolah yang kemudian akan menciptakan siswa-siswa yang berkualitas, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di dalam konteks manajemen keuangan, sekolah sudah menggunakan fungsi anggaran sebagai alat politik untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus dapat meyakinkan sumber-sumber ekonomi termasuk orang tua siswa dan masyarakat.
2. Lingkungan sekolah yang lebih kondusif. Kondisi sekolah terlihat lebih bersih, tertata, aman dan terpelihara dengan baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya sehingga lingkungan sekolah relatif kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena sekolah betul-betul memperhatikan sarana-sarana tersebut. Bentuk perhatian ini tentunya sekolah sudah mengalokasikan dana yang cukup untuk kebutuhan sarana dan prasarana secara proporsional. Dalam realisasi dua tahun anggaran terakhir ketiga sekolah tersebut mengalokasikan besarnya dana untuk sarana prasarana sebesar 24-25% dari anggaran keseluruhan. Sekolah juga terus berupaya untuk mencari sumbangan untuk sarana-sarana tersebut, seperti yang dilakukan oleh SMPN 1 yang mendapatkan bantuan dari ikatan alumninya, SMPN 5 dan 8 yang menarik sumbangan fisik yang cukup besar. Dana yang cukup, alokasi anggaran yang proporsional, serta penggalan

sumber pendapatan lain merupakan bentuk upaya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah tersebut.

3. Birokrasi sekolah yang kompak. Berbeda dengan manajemen sebelumnya, MPMBS merupakan manajemen sekolah yang partisipatif dan transparan (termasuk dalam perencanaan serta pengelolaan anggaran). Manajemen keuangan dengan asas partisipasi dan transparansi ini membuat birokrasi sekolah merasa bertanggung jawab terhadap kinerja dan tugasnya masing-masing, lebih percaya diri, komunikatif, terbuka, tidak saling curiga serta bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah.
4. Guru yang profesional dengan kompetensi yang tinggi dalam pengajaran dan pendidikan. MPMBS menuntut guru-guru SMPN 1, 5, dan 8 untuk lebih kompeten dan profesional. Untuk upaya ini, ketiga sekolah tersebut setiap tahunnya selalu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan-pelatihan dalam peningkatan kompetensi guru-guru sekali-pun dana yang diperoleh masih kurang memadai.
5. Materi, perlengkapan, dan fasilitas sekolah yang lengkap. Penulis melihat materi ajar, perlengkapan dan fasilitas SMP 1,5,dan 8 cukup lengkap, seperti dokumen-dokumen kurikulum yang lengkap, fasilitas sekolah yang mendukung seperti laboratorium eksak, perpustakaan dengan buku-bukunya yang sesuai dengan kurikulum, sarana olah raga seperti lapangan voli, lapangan sepak bola, tenis meja, lapangan basket, sarana-sarana kebersihan seperti tempat sampah, kamar mandi/WC untuk guru-guru (putra/putri), dan siswa (putra/putri). Kelengkapan ini semua dikarenakan sekolah mempunyai anggaran perawatan yang cukup dan mengalokasikannya secara profesional. Penganggaran untuk sarana prasarana sekolah merupakan salah satu rencana anggaran prioritas ketiga sekolah tersebut. Di sinilah fungsi anggaran sebagai alat perencanaan, yang salah satunya adalah merencanakan berbagai program/kegiatan prioritas serta sarana dan pra-sarana yang akan mendukung tujuan pendidikan di sekolah.
6. SMPN 1, 5, dan 8 mempunyai anggaran yang cukup, sekalipun masih mengandalkan pemerintah dan orang tua. Ketiga sekolah tersebut sangat diuntungkan oleh citra sekolahnya sebagai sekolah favorit di Yogyakarta,

sehingga asumsi-asumsi orang tua dan masyarakat seperti yang sudah dijelaskan di atas akan sangat mendukung pada kekuatan finansial sekolah. Terlebih lagi di antara sekolah tersebut mempunyai sumber pendapatan rutin dari Ikatan Alumni sekolahnya, seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Alokasi keuangan yang proporsional, transparan serta subsidi silang anggaran merupakan bagian dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah yang baik.

7. Proses kegiatan pembelajaran yang baik. Kegiatan pembelajaran di ketiga SMP tersebut cukup baik, terutama pada penggunaan waktu kegiatan sekolah yang relatif disiplin. Ketepatan waktu kegiatan sekolah ini juga sangat tergantung pada kesiapan dana di sekolah. Sekolah-sekolah lain sering mengalami hambatan dalam waktu pembelajaran dikarenakan seringnya terlambat dana pemerintah ke sekolah. Untuk SMP 1, 5, dan 8, keterlambatan tersebut bukanlah dijadikan hambatan yang serius, karena ketiga sekolah tersebut bisa mengatasinya dengan dana sekolah sendiri baik pinjam dari tabungan siswa maupun bendahara komite. Kondisi seperti ini sangat menuntut bagaimana sekolah bisa mengelola keuangannya dengan efektif dan efisien.
8. Budaya dan iklim sekolah di SMP 1, 5, dan 8 Yogyakarta cukup kondusif. Penulis melihat bahwa ada ketenangan dan keteraturan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang mendukung ketenangan dan keteraturan sekolah yang akhirnya mengarah kepada budaya dan iklim sekolah yang kondusif, yang penulis lihat di antaranya situasi sekolah yang tenang yang jauh dari keramaian. Dekorasi dan alat pembelajaran di kelas yang lengkap, seperti buku-buku, peta, tempat sampah, foto-foto pahlawan, gorden jendela yang bersih, meja dan kursi yang tertata rapi dan baik, dan lain-lain. Sarana dan prasarana tersebut terlihat terawat dengan baik. Hal ini tentunya dikarenakan sekolah memperhatikan sarana-sarana tersebut hingga anggaran untuk alokasi pengadaan dan perawatan sarana prasarana tersebut dianggarkan pada RAPBS. Jumlah alokasi dananya pun cukup besar.
9. Pengelolaan keuangan akan sangat besar hubungannya dengan prestasi siswa. Prinsip manajemen keuangan berbasis sekolah pada dasarnya sama dengan

prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, yakni peningkatan mutu dan partisipasi. Manajemen keuangan yang baik akan memprioritaskan pada program serta kegiatan-kegiatan sekolah yang bermutu sehingga pada akhirnya akan mendukung pada prestasi siswa yang baik. Prestasi siswa yang paling mudah dilihat adalah dari hasil Nilai Ebtanas Murni (NEM). SMP Negeri 1, 5, dan 8 adalah sekolah yang mempunyai rata-rata NEM yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan salah satunya adalah besarnya biaya pendidikan baik yang berasal dari pemerintah, kontribusi keluarga maupun dari sumber-sumber lainnya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai "Manajemen pembiayaan berbasis sekolah" di SMP Negeri 1, 5, dan 8 Yogyakarta, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. RAPBS setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan sekitar 20%. Dalam konteks MBS, pendekatan perencanaan keuangan yang dipakai tidak lagi menggunakan *line item budget*, tetapi pendekatan yang didasarkan kepada kebutuhan program dan kinerja sekolah. Dalam rapat RAPBS, seringkali kepala sekolah dan bendahara hanya membicarakan dan mencatat dana yang berasal dari pemerintah dan orang tua, sementara dana-dana lain yang diperoleh sekolah hampir tidak pernah dibicarakan.
2. Pengesahan keuangan sekolah tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tetapi juga oleh Tim Monitoring *Block Grant*, yang komponennya terdiri dari Dinas P&P, Dewan Pendidikan, Bappeda, BPKD, dan LPI.
3. Hampir 85% anggaran sekolah dipergunakan untuk gaji dan kesejahteraan, sementara sisanya untuk KBM. Dana pemerintah untuk KBM disebut sebagai dana *block grant*.
4. Laporan keuangan sekolah disampaikan tidak hanya kepada Dinas Pendidikan, tetapi juga kepada Komite Sekolah, Tim Monitoring *block grant*, walikota, BPKD, dan LPI.

5. Evaluasi anggaran dilakukan oleh evaluator eksternal (Dewan Pendidikan, tim monitoring, BPKD, dan LPI). Kinerja evaluator belum maksimal dan seringkali peran dan fungsinya mengalami tumpang tindih.
6. Kepala sekolah serta *stakeholders* lainnya sedang terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis untuk menarik serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selama ini kontribusi masyarakat masih terbatas kontribusi non finansial.

Saran-saran

Beberapa saran yang ingin penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Kepala sekolah yang belum menerapkan MPMBS diharapkan agar segera mempersiapkan untuk menerapkan pola MPMBS.
2. Di dalam mempersiapkan MPMBS, sekolah perlu membenahi berbagai sektor, mulai kepemimpinan kepala sekolah, metode pembelajaran, interaksi sosial dengan masyarakat, serta pembenahan terhadap sistem pengelolaan keuangan sekolah.
3. Pemerintah harus segera membuat format baru tentang pola manajemen keuangan berbasis sekolah yang sesuai dengan prinsip MBS

Daftar Pustaka

- Depdiknas (2001). *Laporan hasil penelitian penyusunan biaya satuan pendidikan SD, SLTP, SMU, dan SMK Negeri Jakarta*. Jakarta: Depdiknas.
- Nanang Fatah. (2000). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fasli Jalal & Supriyadi (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Fred, D. (2002) *Manajemen Strategis : Konsep dan aplikasinya*. Jakarta: Prenhallindo.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andy Yogyakarta.
- Moleong (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriadi, D. (2003). *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya